
Optimalisasi Budaya Demokrasi Deliberatif dalam Upaya Mewujudkan Perencanaan Partisipatif di Tingkat Desa **(Studi di Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar)**

I Wayan Sudana dan I Nyoman Wiratmaja
Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa
wayan.sudana@gmail.com

How to cite (in APA style):

Sudana, I, W., & Wiratmaja, I, N. (2018). Optimalisasi Budaya Demokrasi Deliberatif dalam Upaya Mewujudkan Perencanaan Partisipatif di Tingkat Desa (Studi di Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar). *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 9(2), pp.84-89. <http://dx.doi.org/10.22225/sintesa.9.2.1292.84-89>

Abstract

Musrenbang (village development planning conference) is an aspirational conference product that care of community needs. The outcome of the meeting is intended to facilitate human source and obtain the support of implementation program in order to protect communities from economy exploitation and enable to maximize the community's welfare. Through bottom-up approach, community have a big chance to convey their aspiration. The planning at village level, of course there must be synchronization and synergy with programs and activities between sub-districts, provinces and national levels. The method used in this study uses qualitative analysis with data collection techniques using interviews and FGD (Focus Group Discussion) to obtain information from informants. The results of the research prove that almost all respondents already known that in the context of making village development planning, they must go through the Village Development Planning Conference (Musrenbangdes) and at the same time involve community participation. This shows that community involvement in village development planning is very important, because it will have a good impact on the implementation of development in the village later. Overall, it can be concluded that the culture of deliberative democracy has been carried out quite well in Sukawati Village in an effort to realize participatory planning, although there are a number of notes that need to get attention so that the process of deliberative democracy increases in quality.

Keywords: *Deliberative democracy culture; participatory lanning and musrenbang*

I. PENDAHULUAN

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bisa dikatakan sebagai permulaan era otonomi desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip otonomi berpijak pada asumsi bahwa pemerintahan yang lebih dekat adalah lebih baik, karena akan berakibat pada pemerintahan yang dijalankan lebih tepat, lebih cepat dan lebih murah. Di tingkat desa dapat diartikan bahwa pemerintah dan masyarakat desa pastilah lebih mengenal desanya sendiri. Undang-Undang Desa ini memberikan kesempatan dan sekaligus menuntut agar setiap desa lebih mengenali potensi dan jati dirinya, serta mampu membangkitkan kreativitas dan pikiran inovatifnya untuk membangun Desa menuju kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah Desa secara nyata harus jauh lebih bertanggungjawab atas pembangunan desanya dan bukan lagi sekadar menunggu petunjuk dari pemerintah atasan. Keberhasilan pembangunan di setiap desa akan berarti pula pada keberhasilan pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Artinya, membangun Indonesia dapat dimulai dari setiap Desa.

Perencanaan pembangunan desa sebaiknya dimulai dari bawah (bottom up) dan partisipatif. Ini akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi yang dimiliki dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Perencanaan sudah seharusnya benar-benar matang. Ada perumpamaan mengatakan bahwa perencanaan yang tidak baik sama dengan merencanakan kegagalan, makanya dalam perencanaan

pembangunan mesti melibatkan seluruh sektor termasuk di tingkat desa. Pemerintahan yang demokratispun sangat diharapkan terwujud di tingkat pelayanan pemerintahan yang terendah atau terdepan yakni di tingkat desa. Semangat demokrasi inilah yang diemban Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Musrenbang merupakan produk musyawarah aspiratif dan harus peka terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil musyawarah bertujuan untuk memobilisasi sumber daya dalam mendapatkan dukungan implementasi program, agar dapat melindungi masyarakat dari eksploitasi ekonomi dan mampu untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan bottom-up, masyarakat mempunyai kesempatan besar untuk menyampaikan aspirasinya. Perencanaan tingkat desa tentu harus ada sinkronisasi dan sinergitas dengan program dan kegiatan antara kabupaten, provinsi dan nasional. Perencanaan yang baik diharapkan ke depannya dapat mewujudkan hasil pembangunan yang berkualitas.

Membuat perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat tidaklah mudah. Seringkali terjadi perencanaan pembangunan yang bias elite dan kepentingan perorangan ataupun kelompok. Semangat Musrenbang Desa mesti ditingkatkan kualitasnya, agar benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakatnya, bukan sekadar formalitas atau rutinitas yang asal jalan. Setiap anggota BPD di desa, mestinya terlibat aktif dalam setiap tahapan musrenbang untuk mengawal aspirasi warga desa. Kebijakan perencanaan pembangunan yang aspiratif akan memperlancar pelaksanaan pembangunan.

Sangat disayangkan pelaksanaan Musrenbangdes masih banyak mengandung distorsi. Perencanaan di semua level sebenarnya tidak berlangsung secara partisipatif, melainkan bersifat oligarkis. Kelompok-kelompok yang marginal lebih sering atau sama sekali tidak terlibat dalam Musrenbang. Di level desa, kabupaten/kota maupun provinsi, partisipasi dilakukan secara terbatas, hanya melibatkan sedikit unsur masyarakat yang diambil dengan pendekatan tebang pilih ([Zamroni & Zainal, 2008](#)).

Akibatnya ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian secara kritis, di tengah gencarnya upaya untuk menegakkan demokrasi secara substansial, diantaranya benarkah ada kesungguhan untuk menempatkan partisipasi rakyat ditempat yang terhormat dalam proses pembangunan desa? Ataukah partisipasi itu hanya menjadi komoditas politik paling laris dikalangan elit politik di desa? Apakah memang betul-betul telah terbentuk ruang publik (public sphere) untuk membentuk diskursus bersama dalam setiap pembuatan kebijakan publik termasuk perencanaan pembangunan di tingkat desa? Ataukah yang terjadi adalah demokrasi semu (pseudo-democracy) karena pada hakekatnya yang menentukan kebijakan dalam negeri ini melulu para elite semata? Lantas peran rakyat di mana?.

Pada penelitian sebelumnya, ([Suwandi & Rostyaningsih, 2012](#)) menemukan Proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan dengan baik di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon, dimana beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, diantaranya tahapan persiapan yakni Musyawarah pra musrenbang dan tahapan pembahasan kegiatan/penetapan prioritas kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat musrenbang Kecamatan. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian ([Rafi & Wicaksono, 2017](#)), mereka menemukan bahwa pertimbangan minat dalam perencanaan pembangunan pedesaan masih belum berjalan dengan baik. Selain itu musyawarah dalam pembangunan pedesaan masih belum dapat memiliki dampak yang signifikan. Begitu juga dengan penelitian ([Sigalingging & Warjio, 2014](#)) menemukan bahwa perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah belum dilaksanakan dengan baik ditandai dengan keengganan masyarakat ikut berpartisipasi, kemampuan aparat dan masyarakat dalam melaksanakan perencanaan partisipatif belum memadai dan tim delegasi desa dan kelurahan belum mempunyai kemampuan untuk negosiasi pada musrenbang kecamatan maupun kabupaten sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat dan pemerintah mempunyai peran terkait rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka peneliti sangat tertarik meneliti tentang optimalisasi budaya demokrasi deliberatif dalam mewujudkan perencanaan partisipatif di tingkat desa. Pentingnya peneliti mengangkat budaya demokrasi deliberatif secara konseptual karena dalam mengambil keputusan pada suatu organisasi model demokrasi ini dianggap tidak ada satu pun nilai dan perspektif individual yang benar dengan sendirinya tanpa lebih dulu melalui proses dialog dan persetujuan dengan individu lainnya. Selain itu dialog memungkinkan semua sudut pandang yang bersifat pribadi mendapatkan kesempatan untuk “diuji” kebenarannya setelah dipertemukan dengan

sudut pandang pribadi yang lain. Bila disederhanakan, demokrasi deliberatif adalah model demokrasi yang menganggap legitimasi politik setiap proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan bersumber dari deliberasi publik antar warganegara yang bebas dan sederajat. Kedaulatan rakyat karenanya tidak lagi direpresentasikan oleh kotak suara atau suara mayoritas semata, tapi juga yang lebih penting berdasarkan pada keputusan-keputusan bersama yang dibuat dengan menggunakan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dan penjelasan yang bisa diperdebatkan. Harapannya adalah dialog antar warganegara akan memungkinkan transformasi preferensi-preferensi yang bersifat pribadi menjadi sudut pandang yang bisa diuji kelayakan dan kebenarannya secara publik. Dengan demikian, dapat dikatakan demokrasi deliberatif sebagai model demokrasi yang melahirkan aturan hukum yang legitimasinya bersumber dari kualitas prosedur deliberasi, bukan saja dalam lembaga lembaga formal negara seperti parlemen, tapi juga dalam masyarakat secara keseluruhan

II. METODE

Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan mewawancarai langsung para narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari berbagai arsip, dokumen, literature, data statistik, maupun catatan-catatan lainnya yang relevan dengan penelitian Penentuan Informan kunci yang dijadikan sumber data dan informasi diantaranya adalah kepala desa, ketua BPD, tokoh-tokoh masyarakat, kelompok usaha masyarakat, perwakilan gender.

Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara untuk mewawancarai para informan terpilih dan juga menggunakan pedoman FGD (Focus Group Discussion) atau Diskusi Kelompok Terarah untuk mendapatkan data dari kelompok masyarakat. Semua jawaban direkam dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan *tape recorder*, kamera dan catatan sistematis.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, wawancara dan FGD Analisis Data. Analisis data dilakukan melalui proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data.

Penyajian Hasil Analisis Data

Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998). Bogdan dan Taylor in (Moleong, 2007) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Temuan-temuan penelitian akan disajikan secara deskriptif induktif analitis, serta diorganisasikan secara rinci dan sistematis sesuai urutan pokok masalah atau fokus kajian penelitian. Temuan-temuan penelitian yang disajikan dalam laporan penelitian merupakan serangkaian fakta yang sudah direduksi secara cermat dan sistematis dan dibantu dengan bagan-bagan, maupun tabel yang dibutuhkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Responden

Responden yang terlibat di dalam penelitian ini memiliki status yang berbeda-beda. Ada unsur kepala dusun, kelompok PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan tokoh masyarakat serta masyarakat yang berada di lingkungan Desa Sukawati. Seluruh responden

berjumlah 17 orang yang terdiri dari 16 orang laki-laki dan seorang perempuan. Seluruh responden beragama Hindu. Tingkat pendidikan responden sudah baik karena sebagian besar berpendidikan menengah dan perguruan tinggi.

Musrenbang Desa dan Partisipasi

1. Hampir semua responden sudah mengetahui bahwa dalam rangka pembuatan perencanaan pembangunan desa harus melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan sekaligus melibatkan partisipasi masyarakat. Walaupun ada seorang responden menyatakan perencanaan pembangunan desa bisa juga tidak dilaksanakan melalui Musrenbangdes, tapi dalam hal ini yang dimaksud adalah tidak perlu semua warga dilibatkan melainkan cukup melalui perwakilan saja. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sangatlah penting, karena akan dapat berdampak baik dalam pelaksanaan pembangunan di desa nantinya.
2. Sebagian besar responden yang sudah diundang bersedia datang dan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Mereka semua aktif dalam memberikan usulan-usulan untuk dimasukkan dalam perencanaan desa. Bisa dikatakan bahwa semua warga yang pernah diundang dan menghadiri musrenbangdes telah memberikan usulan-usulan berkaitan dengan pembangunan Desa sejalan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
3. Sebagian besar responden yang mengikuti musrenbang desa menyatakan bahwa cukup banyak usulan yang diterima atau diadopsi dalam perencanaan desa. Sedangkan sebagian lainnya menyatakan sangat banyak usulan yang diterima. Sebagian besar dari usulan yang diterima biasanya lebih didasarkan oleh karena usulan itu diaspirasikan oleh banyak orang atau peserta musrenbang desa dan bukan semata-mata karena diusulkan oleh tokoh-tokoh desa maupun karena diusulkan oleh aparat desa. Sedangkan kalau sebuah usulan warga ditolak atau belum bisa diadopsi adalah lebih karena bukan merupakan kepentingan umum dan ada juga yang menyatakan alasan ditolak atau belum bisa diadopsi karena keterbatasan anggaran yang tersedia. dapat dikatakan bahwa alasan penolakan cukup berimbang dengan penolakan karena bukan kepentingan umum dan penolakan karena keterbatasan dana/anggaran.
4. Cukup banyak program yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah Desa untuk ke depan. Dapat diurutkan prioritas program yang menurut responden perlu mendapatkan perhatian adalah mulai dari pentingnya melakukan pembinaan kepada STT dan PKK, selanjutnya adalah membentuk kelompok ekonomi kreatif dan juga membentuk sekaa seni dan budaya, prioritas pembangunan jalan desa, menyelenggarakan event seni budaya, prioritas penyelenggaraan event olah raga, membuat sekolah, membangun balai desa, maupun melakukan pembinaan sekaa lainnya yang ada di Desa.
5. Sebagian besar responden sudah mengetahui rencana Desa atau hal apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa di tahun yang sedang berjalan. Sebagian kecil menyatakan hanya sedikit tahu. Sebagian besar warga Desa menyatakan cukup antusias mendukung program-program pembangunan Desa, sedangkan sebagian lainnya yang menyatakan sangat antusias untuk mendukung program-program pembangunan Desa.
6. Kontribusi yang diberikan oleh responden dalam menyukseskan program-program desa sebagian besar dalam bentuk gagasan atau buah pemikiran dan kontribusi tenaga. Hanya sebagian kecil yang bersedia memberikan kontribusi berupa barang dan kontribusi dalam bentuk uang.
7. Tingkat kepercayaan bisa dikatakan tinggi karena sebagian besar responden menyatakan sangat percaya kepada aparat pemerintah Desa dan sebagian lainnya menyatakan cukup percaya. Kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah Desa sangat berkaitan dengan pernyataan responden bahwa sampai saat ini belum pernah ada masalah hukum berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan Desa.
8. Aspek hasil dan implikasi pembangunan Desa sudah baik. Seluruh responden menyatakan bahwa kondisi infrastruktur jalan saat ini sudah baik. Sedangkan untuk kondisi infrastruktur air bersih, jaringan listrik, jaringan telpon, kondisi balai banjar, maupun balai desa pada saat ini masih dalam kondisi yang baik. Walaupun ada juga sebagian kecil masih ada yang kondisinya belum baik.
9. Sebagian besar responden meyakini bahwa kondisi desa lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi Desa secara umum 5 tahun yang lalu. Hanya sebagian kecil menganggap kondisi Desanya tetap sama seperti 5 tahun yang lalu. Tidak ada yang menyatakan kondisi desa saat ini lebih buruk

dibandingkan 5 tahun yang lalu.

10. Sebagian besar responden menyatakan bahwa kondisi keamanan di desa lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi Desa secara umum 5 tahun yang lalu. Sedangkan sebagian kecil yang menyatakan tetap saja atau sama saja dengan kondisi sebelumnya. Tidak ada yang menyatakan kondisi keamanan di desa saat ini lebih buruk dibandingkan 5 tahun yang lalu.
11. Sebagian besar responden meyakini bahwa kondisi ekonomi di desa lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi Desa secara umum 5 tahun yang lalu. Sebagian kecil lainnya menyatakan tetap saja atau sama saja dengan kondisi lima tahun yang lalu. Ada seorang responden yang menyatakan kondisi ekonomi di desa saat ini lebih buruk dibandingkan 5 tahun yang lalu.
12. Sebagian besar responden menyatakan bahwa kondisi kerukunan antar warga di desa lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi Desa secara umum 5 tahun yang lalu. Sedangkan sebagian lainnya menyatakan tetap saja atau sama saja dengan kondisi lima tahun yang lalu. Tidak ada yang menyatakan kondisi kerukunan antar warga di desa saat ini lebih buruk dibandingkan 5 tahun yang lalu.
13. Seluruh responden meyakini bahwa kondisi kehidupan politik dan demokrasi di desa lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi Desa secara umum 5 tahun yang lalu. Tidak ada yang menyatakan kondisi kehidupan politik dan demokrasi di desa saat ini lebih buruk dibandingkan 5 tahun yang lalu.
14. Tingkat kemiskinan di Desa Sukawati bisa dikatakan rendah karena sebagian besar responden menyatakan sedikit sekali jumlah warga miskin di desa dan hanya sebagian kecil yang menyatakan cukup banyak warga miskin di desa.
15. Sebagian besar responden merasa sangat yakin bahwa program Desa akan bermanfaat dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Desa. Sedangkan sebagian kecil lainnya yang menyatakan cukup yakin sebanyak. Tidak ada yang menyatakan tidak yakin kalau program Desa akan bermanfaat dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Desa.
16. Sebagian besar responden merasa sangat yakin bahwa program Desa akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan sebagian kecil lainnya yang menyatakan cukup yakin bahwa program Desa akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Tidak ada yang menyatakan tidak yakin. Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat memang sudah bisa merasakan dalam kehidupan sehari-harinya memang ada manfaat yang nyata dari program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintah Desa.

IV. SIMPULAN

Responden yang terlibat di dalam penelitian sudah cukup mencerminkan keterwakilan stakeholders dalam proses musyawarah rencana pembangunan desa. Ada unsur kepala dusun, kelompok PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat yang berada di lingkungan Desa Sukawati. Sebagian besar responden laki-laki dan seorang perempuan. Seluruh responden beragama Hindu, dengan menyandang tingkat pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Hampir semua responden sudah mengetahui bahwa dalam rangka pembuatan perencanaan pembangunan desa harus melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan sekaligus melibatkan partisipasi masyarakat. Walaupun ada seorang responden menyatakan perencanaan pembangunan desa boleh tidak dilaksanakan melalui Musrenbangdes, namun dia memberikan alasan bahwa yang dimaksudkannya adalah tidak perlu semua warga dilibatkan melainkan cukup melalui perwakilan saja. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa sangatlah penting, karena akan dapat berdampak baik dalam pelaksanaan pembangunan di Desa nantinya. Semua yang diundang menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan pada saat mengikuti musrenbangdes aktif untuk ikut memberikan usulan-usulan untuk dimasukkan dalam perencanaan desa. Bisa disimpulkan bahwa semua warga yang pernah diundang dan menghadiri musrenbangdes telah berpartisipasi secara aktif dan tidak ada yang hanya menjadi pendengar saja dalam proses musyawarah. Pelaksanaan musrenbang Desa sudah berjalan dengan baik dan dinamis karena semua peserta aktif dan banyak memberikan masukan maupun usulan-usulan program. Usulan yang diterima biasanya lebih didasarkan oleh karena usulan itu diaspirasikan oleh banyak orang atau

peserta musrenbang Desa dan bukan semata-mata karena diusulkan oleh tokoh-tokoh desa maupun karena diusulkan oleh aparat desa. Sedangkan usulan yang ditolak atau belum bisa diadopsi adalah lebih karena bukan merupakan kepentingan umum dan karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Cukup banyak program yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah Desa untuk ke depan. Dapat diurutkan prioritas program yang menurut responden perlu mendapatkan perhatian adalah mulai dari pentingnya melakukan pembinaan kepada STT dan PKK, selanjutnya adalah membentuk kelompok ekonomi kreatif dan juga membentuk sekaa seni dan budaya, prioritas pembangunan jalan desa, menyelenggarakan event seni budaya, prioritas penyelenggaraan event olah raga, membuat sekolah, membangun balai desa, maupun melakukan pembinaan sekaa lainnya yang ada di Desa. Sebagian besar masyarakat sudah tahu dan antusias mendukung pelaksanaan program-program yang sudah dicanangkan dalam perencanaan pembangunan Desa di tahun yang sedang berjalan. Kontribusi dari warga yang bisa berikan dalam menyukseskan program-program Desa sebagian besar adalah dalam bentuk pemikiran, disusul kontribusi tenaga. Hanya sebagian kecil yang bersedia memberikan kontribusi berupa barang maupun kontribusi dalam bentuk uang. Tingkat kepercayaan bisa dikatakan tinggi karena sebagian besar warga menyatakan sangat percaya kepada aparat pemerintah Desa dan sebagian lainnya menyatakan cukup percaya. Kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah Desa sangat berkaitan dengan posisi aparat Desa sampai saat ini belum pernah ada masalah hukum berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan Desa.

Hasil pembangunan di Desa sudah dirasakan baik oleh warga. Hal ini terlihat dari kondisi berbagai infrastruktur seperti: jalan, air bersih, jaringan listrik, jaringan telpon, kondisi balai banjar, maupun balai desa pada saat ini sudah dan masih dalam kondisi yang baik. Secara umum kondisi Desa dirasakan lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi Desa di masa 5 tahun yang lalu. Demikian juga dengan kondisi keamanan dan kehidupan ekonomi di desa dirasakan lebih baik oleh sebagian besar warga jika dibandingkan dengan kondisi Desa secara umum 5 tahun yang lalu. Kondisi kerukunan antar warga dan kondisi kehidupan politik di desa, oleh sebagian besar warga dirasakan lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi Desa secara umum 5 tahun yang lalu. Tidak ada yang menyatakan kondisi kerukunan antar warga dan kondisi kehidupan politik dan demokrasi di desa saat ini lebih buruk dibandingkan 5 tahun yang lalu. Tingkat kemiskinan di Desa Sukawati bisa dikatakan rendah dan sebagian besar warga merasa sangat yakin bahwa program Desa akan bermanfaat dalam upaya mengentaskan kemiskinan, serta akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa budaya demokrasi deliberatif sudah dijalankan dengan cukup baik di Desa Sukawati dalam upaya mewujudkan perencanaan partisipatif, walaupun ada beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian agar proses demokrasi deliberatif semakin meningkat kualitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design*. California: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rafi, M., & Wicaksono, B. (2017). Deliberasi Dalam Pembangunan Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014-2015. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 1–12.
- Sigalingging, A. H., & Warjio. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 116–145.
- Suwandi, & Rostyaningsih, D. (2012). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(2). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v1i2.1318>
- Zamroni, S., & Zainal, A. (2008). Aplikasi Kebijakan Gender Budgeting sebagai Metodologi Feminis: Menghapus Bentuk-bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui Alokasi Anggaran Pemerintah. *Jurnal Perempuan*.